

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Hendarto Candra Nugroho
NIM. 14.0102.0098

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
Hendarto Candra Nugroho
NIM : 14.0102.0098

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Hendarto Candra Nugroho

NPM 14.0102.0098


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **14 Agustus 2018**.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.


Pembimbing I


Faqiatul Mariya W., S.E., M.Si.
Pembimbing II

Tim Penguji


Wawan Sadtyo N., S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketua


Muji Mranaji, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris


Faqiatul Mariya W., S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **03 SEP 2018**.....



Dra Marlita Kurnia, M.M.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hendaro Candra Nugroho
NIM : 14.0102.0098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 14 Agustus 2018

Peneliti



Hendaro Candra Nugroho

NIM. 14.0102.0098

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hendarto Candra Nugroho
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 31 Januari 1993
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun Ngadiwongso RT 01 RW 01, Desa
Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah
Alamat Email : hendarto.candra.nugroho@gmail.com
Pendidikan Formal
SD (1999-2005) : SDN Salaman 4
SMP (2005-2008) : SMP N 1 Salaman
SMA (2008-2011) : SMA N 1 Salaman
Perguruan Tinggi : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 14 Agustus 2018

Peneliti

Hendarto Candra Nugroho

NIM. 14.0102.0098

MOTTO

Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, dia akan tawadhu'. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya.

(Umar Bin Khatab)

Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik diantara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah, maka tegurlah aku.

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

Jangan biarkan hatimu mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau kamu akan sedih dengan kecaman mereka.

(Imam Al Ghazali)

Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja dia tinggalkan, apalagi kamu.

(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, AK selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Akuntansi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Faqiatul Mariya Waharini S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Wawan Sadyo Nugroho S.E, M.Si selaku Dosen Penguji I yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi.
4. Ibu Muji Mranani S.E, M.Si, Akt selaku Dosen Penguji II yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi.
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
6. Para pegawai pada OPD Kabupaten Magelang atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 14 Agustus 2018
Peneliti

Hendarto Candra Nugroho
NIM. 14.0102.0098

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Daftar Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	12
A. Telaah Teori	12
1. Teori Agensi	12
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
3. Kualitas Laporan Keuangan	14
4. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI	17
5. Sistem Pengendalian Internal	18
6. Motivasi Kerja	19
7. Kompetensi Sumber Daya Manusia	20
B. Telaah Penelitian Terdahulu	21
C. Perumusan Hipotesis	24

D. Model Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Populasi dan Sampel	32
B. Teknik Pengambilan Sampel	33
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
D. Alat Analisis	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Statistik Deskriptif Data	42
B. Statistik Deskriptif Responden	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
D. Uji Kualitas Data	45
E. Regresi Linier Berganda	48
F. Pengujian Hipotesis	50
G. Pembahasan	55
BAB V KESIMPULAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan Penelitian	63
C. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD 2012-2016	4
Tabel 1.2 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Magelang 2012-2016.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	21
Tabel 3.1 Definisi dan pengukuran Variabel	34
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	42
Tabel 4.2 Profil Responden.....	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i>	46
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas.....	47
Tabel 4.6 Koefisien Regresi	48
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi.....	50
Tabel 4.8 Uji F	51
Tabel 4.9 Uji t.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	31
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	40
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	41
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F.....	51
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI	52
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Sistem Pengendalian Internal	53
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Motivasi Kerja	54
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Kompetensi Sumber Daya Manusia	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	68
Lampiran 2 Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner	76
Lampiran 3 Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah)	78
Lampiran 4 Tabulasi Data Kuesioner (Setelah Validasi).....	85
Lampiran 5 Statistik Deskriptif	92
Lampiran 6 Uji Validitas	93
Lampiran 7 Uji Reliabilitas	98
Lampiran 8 Hasil Analisis Regresi.....	100
Lampiran 9 Surat Ijin Riset	101
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Kuesioner	105

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Magelang)

**Oleh :
Hendarto Candra Nugroho
NIM.14.0102.0098**

Kualitas laporan keuangan adalah kesesuaian standar yang berlaku suatu entitas pelaporan laporan keuangan dalam periode tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian pada LKPD tahun 2016, namun BPK masih menemukan adanya temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal, motivasi kerja, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kabupaten Magelang. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari 89 pegawai OPD di wilayah Kabupaten Magelang. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual, motivasi kerja, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal, motivasi kerja, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan putusan pemerintah, banyak terjadi pembaharuan peraturan pemerintah yang sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah untuk menumbuhkan kesadaran membangun daerah secara lebih optimal dan tidak terkonsentrasi di pusat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi sektor publik memerlukan adanya penguat akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang telah diberikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. *Governmental Accounting Standards Boards (GASB)* dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk dapat mengetahui dan menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang telah dilakukan.

Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang relevan membantu pengguna

dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu maupun masa kini dan memprediksi masa depan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang andal memuat informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kejadian secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan haruslah mudah dipahami pengguna agar memudahkan pengguna dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berkualitas juga tercermin dari pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan landasan dari kinerja birokrasi pemerintahan. Laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah kepada masyarakat (Republika.co.id, 2018). Ada empat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan tidak memberi pendapat (TMP).

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, disamping rekomendasi lainnya. Fenomena pelaporan keuangan serta akuntabilitas atas laporan keuangan di Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan menuju ke arah yang lebih baik. Berikut ini perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD 2012-2016

LKPD (Tahun)	OPINI			
	WTP	WDP	TW	TMP
2012	23 %	61 %	1 %	15 %
2013	30 %	59 %	2 %	9 %
2014	47 %	46 %	1 %	6 %
2015	58 %	36 %	1 %	5 %
2016	70 %	26 %	0 %	4 %

Sumber : IHPS BPK RI Semester I Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 secara menyeluruh dalam 5 tahun terakhir mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47%, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 %, yaitu dari 15% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2016 (www.bpk.go.id).

Selain itu, temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan pada LKPD Tahun 2016 juga mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada LKPD Tahun 2014 ditemukan 1193 adanya temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Pada LKPD Tahun 2015 ditemukan 1235 adanya temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Sedangkan pada LKPD Tahun 2016 ditemukan adanya 1137 temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. (www.bpk.go.id).

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2016 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan berupa wajar tanpa

pengecualian (WTP) atas laporan keuangan sudah menjadi keinginan seluruh lembaga pemerintah. Perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan pencapaian terbaik yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir (Radar Semarang, 2017). Opini Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2016

LKPD (Tahun)	Opini
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WTP

Sumber : IHPS BPK RI Semester I Tahun 2017

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk dari transparansi pemerintah kepada masyarakat. Opini Badan Pemeriksa Keuangan berupa wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan sudah menjadi keinginan seluruh lembaga pemerintah. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah sebuah apresiasi terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) perlu adanya pengecekan berkala dan melalui proses yang tersusun secara sistematis.

Meski telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, persoalan aset di Kabupaten Magelang belum bisa dituntaskan. Sejak tahun 2011, masalah pengakuan dan pelaporan aset

selalu menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Puncaknya pada tahun 2015, dan sampai sekarang belum dapat dituntaskan (KRjogja, 2016). Kemudian ada beberapa OPD di wilayah Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Borobudur *News*, 2017).

Setiawan dan Gayatri (2017) dengan variabel akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Wijayanti dan Handayani (2017) tentang Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa variabel implemementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun pada penelitian Yuliani dan Agustini (2016) penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Budiawan dan Purnomo (2014) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di pemerintah Daerah/Kota Bogor menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara hasil penelitian Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun pada penelitian Karsana dan Suaryana (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Armel (2017), Setiawan dan Gayatri (2017), serta Febriyani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lodhrakentjana dan Luthan (2012) dalam penelitiannya tentang Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan di Pemerintah Kota Depok, menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Setiawan dan Gayatri (2017), juga Runtuwene, dkk (2017) yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Wati, dkk (2014) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan pada OPD Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Rahayu, dkk (2014), Lasmara dan Rahayu (2016), Setyowati, dkk (2016), Armel (2017), Pujanira dan Taman (2017), serta Karsana dan Suaryana (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian Latjandu, dkk (2016) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Yuliani dan Agustini (2016) serta penelitian Wijayanti dan Handayani (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Setiawan dan Gayatri (2017) dengan persamaan variabel penelitian yaitu akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja. Sedangkan perbedaannya antara lain, **pertama**, penelitian ini menambah variabel tentang kompetensi sumber daya manusia, dikarenakan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Karsana dan Suaryana 2017).

Kedua, objek penelitian yaitu OPD Kabupaten Magelang, karena pada Tahun 2016 kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, padahal pada tahun-tahun sebelumnya hanya mendapat opini audit wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, persoalan aset yang sudah menjadi masalah sejak tahun 2011 masih belum dapat dituntaskan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dikembangkan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel independen penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan motivasi kerja, serta kompetensi sumber daya manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan atas teori-teori yang telah ada.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, dan memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi sektor publik di Indonesia di masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Bab ini akan dikemukakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang diambil dari beberapa literatur. Selain itu, di dalam bab ini akan disajikan pula penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

Bab III Metoda Penelitian

Bab ini akan diuraikan populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metoda analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara mendalam. Bab ini meliputi statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian validitas / reabilitas, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi. Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Literatur

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori agensi dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menjadikan jasa yang menjadi kepentingan rakyat serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah. Hubungan tersebut dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena pemerintah (*agent*) memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dibandingkan rakyat (*principal*). Upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik *principal* maupun *agen* yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD (akuntabilitas dual horizontal).

Praktik pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Teori keagenan menyatakan sulit untuk mempercayai bahwa pemerintah (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan rakyat (*principal*), sehingga rakyat melalui legislatif perlu mengukur, menilai sekaligus mengawasi aktivitas-aktivitas pemerintahan. Aktivitas-aktivitas tersebut dinilai melalui kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, OPD yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yaitu masyarakat secara langsung maupun diwakilkan oleh DPRD sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu Basis akuntansi; Prinsip nilai historis; Prinsip realisasi; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; Prinsip penyajian wajar.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial. Seluruh komponen-komponennya menjadi sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Kualitas Laporan Keuangan

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan

dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berdasarkan GASB (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 informasi harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut: keterpahaman (*understandability*), keterandalan (*reliability*), keberpautan (*relevance*), ketepatanwaktuan (*timeliness*), ketaatasasan (*consistency*), dan keterbandingan (*comparability*). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan disajikan selengkap mungkin. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik; penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (Halim, 2007). Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut Heather Thomson, dalam Arina, dkk (2014) terdapat beberapa tujuan penggunaan basis akrual yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik.
- 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- 3) Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2008). Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Romney dan Steinbart, 2009).

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010). Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan

segenap personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011)

6. Motivasi Kerja

Motivasi kerja adalah kemauan kerja karyawan yang timbulnya karena adanya dorongan dari dalam pribadi karyawan yang bersangkutan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan pengaruh lingkungan sosial dimana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut (Anoraga dan Widiyanti, 1993). Motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan Robbins dan Judge (2007).

Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah laku (Handoko, 1995). Motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2001).

7. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik dari seseorang yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas fungsi akuntansi dilihat dari pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta ketrampilan yang dimiliki (Tjiptoherijanto, 2001). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hevesi, 2005).

Menurut Spancer dan Spancer (1993), kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Kompetensi terdiri dari 5 (lima) karakteristik yaitu:

- 1) *Motives* adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
- 2) *Traits* adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
- 3) *Self Concept* adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- 4) *Knowledge* adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
- 5) *Skills* adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	Lasmara dan Rahayu (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Latjandu, dkk (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud	Komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Setyowati, dkk (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang	Peran teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dan internal audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
4.	Yuliani dan Agustini (2016)	Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan kompetensi SDM, penerapan SAP, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Armel (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
6.	Febriyani, dkk (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
7.	Karsana dan Suaryana (2017)	Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bangli	Penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
8.	Setiawan dan Gayatri (2017)	Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja pada Kualitas Laporan Keuangan	Akuntansi berbasis sistem intern dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
9.	Pujanira dan Taman (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Kompetensi sumber manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY.
10.	Runtuwene, dkk (2017)	Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Penerapan SIMDA, SAP, pegawai dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
11.	Wijayanti dan Handayani (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Implementasi Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi dan daya manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (Halim, 2007). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Berdasarkan teori keagenan Jensen & meckling (1976), hubungan antara agen dengan principal dapat mengarah pada kondisi

ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dibandingkan principal. Upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik principal maupun agen yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*. Menurut Van der Hoek (2005) penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual memberikan manfaat antara lain mendukung kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset. Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian melalui penerapan akuntansi berbasis akrual yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga kualitas laporan keuangan menjadi berkualitas.

Setiawan dan Gayatri (2017) serta Wijayanti dan Handayani (2017) membuktikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal itu berbeda dengan hasil dari penelitian Yuliani dan Agustini (2016) yang

menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H1. Penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Berdasarkan teori keagenan Jensen & meckling (1976), hubungan antara agen dengan principal dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dibandingkan principal. Upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik principal maupun agen yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *monitoring cost*. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Pengendalian internal memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi. Sehingga sistem pengendalian internal dapat meminimalisir asimetri informasi.

Karsana dan Suaryana (2017), Armel (2017), Setiawan dan Gayatri (2017), serta Febriyani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Budiawan dan Purnomo (2014) serta penelitian Yuliani dan Agustini (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

c. Pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Motivasi kerja adalah kemauan kerja karyawan yang timbul karena adanya dorongan dari dalam pribadi karyawan yang bersangkutan

sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan pengaruh lingkungan sosial dimana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut (Anoraga dan Widiyanti, 1993). Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan teori keagenan Jensen & meckling (1976), hubungan antara agen dengan principal dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dibandingkan principal. Upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik principal maupun agen yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Motivasi kerja merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*. Dalam pengelolaan keuangan perlu adanya motivasi kerja yang positif, yang didukung lingkungan kerja yang positif dan sarana maupun prasarana yang memadai. Motivasi kerja berkaitan dengan semangat untuk menyelesaikan tugasnya didalam suatu organisasi serta meningkatkan inisiatif dan optimisme yang tinggi. Motivasi kerja diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian Lodhrakentjana dan Luthan (2012), Setiawan dan Gayatri (2017) serta Runtuwene, dkk (2017) membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

d. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik dari seseorang yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas fungsi akuntansi dilihat dari pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta ketrampilan yang dimiliki (Tjiptoherijanto, 2001). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hevesi, 2005).

Berdasarkan teori keagenan Jensen & meckling (1976), hubungan antara agen dengan principal dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dibandingkan principal. Upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya

keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik principal maupun agen yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

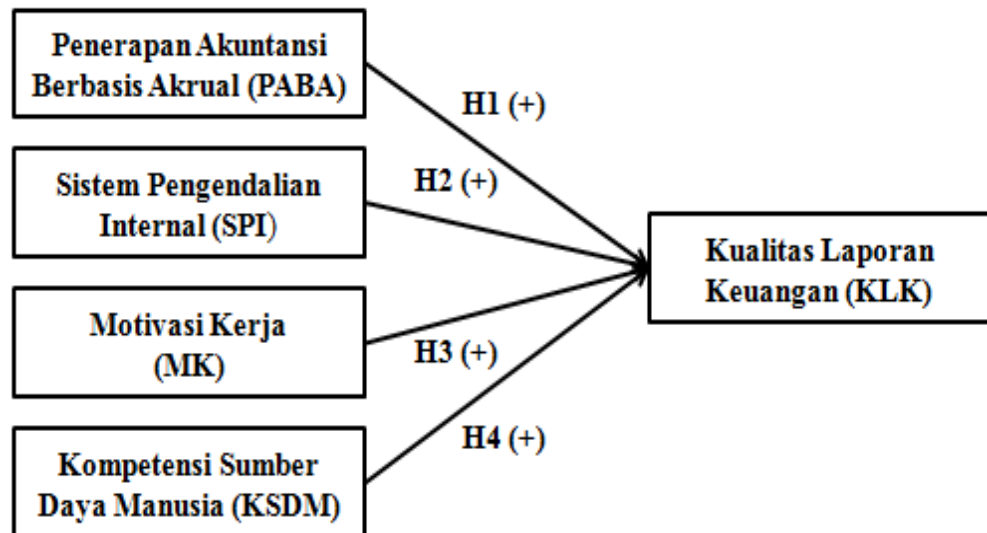
Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*. Sumber daya manusia berkaitan langsung dengan sistem sehingga dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan, kompetensi sangat dibutuhkan agar hasil yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kesalahan yaang fatal yang dapat mengganggu kinerja. Adanya kompetensi sumber daya manusia yang bagus akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bagus pula.

Wati, dkk (2014), Rahayu, dkk (2014), Lasmara dan Rahayu (2016), Setyowati, dkk (2016), Armel (2017), Pujanira dan Taman (2017), serta Karsana dan Suaryana (2017) membuktikan dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Latjandu, dkk (2016), Yuliani dan Agustini (2016) serta Wijayanti dan Handayani (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

D. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang.

Pengambilan sampel atau responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Sekaran, 2003). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala sub bagian keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi/keuangan/pembukuan dengan alasan bahwa merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan dengan asumsi bahwa dalam periode tersebut sudah memiliki bekal pengalaman.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2012 :14). Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran atas suatu keadaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang. Data sekunder penelitian ini adalah artikel, jurnal, jumlah OPD yang ada di website Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dan data IHPS Semester I BPK RI Tahun 2017.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survei dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria responden di OPD Kabupaten Magelang dengan menggunakan item-item pernyataan yang telah dibatasi dalam pemberian jawaban dengan bobot 1 sampai 5 untuk tingkat setuju atau tidak setuju.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen		
1. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua (PABA)	Akuntansi berbasis akrua adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (Halim, 2007). Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, akuntansi berbasis akrua adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.	Instrumen 10 butir pernyataan mengacu pada penelitian Hasibuan (2015) dengan 3 indikator: 1. Pengakuan 2. Pencatatan 3. Pengukuran Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan	Instrumen 9 butir pernyataan mengacu pada penelitian Sukmaningrum (2012) dengan 5 indikator : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen		
	terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011)	Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.
3 Motivasi Kerja (MK)	Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah laku (Handoko, 1995).	Intrumen 10 butir pernyataan mengacu pada penelitian Naryanti (2013) dengan 5 indikator : 1. Fisiologi 2. Rasa aman 3. Sosial 4. Penghargaan 5. Aktualisasi diri Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.
4 Kompetensi Sumber Daya manusia (KSDM)	Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Havesi, 2005).	Instrumen 9 butir pernyataan mengacu penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) dengan menggunakan 4 indikator : 1. Pendidikan 2. Tanggungjawab 3. Pengalaman 4. Pelatihan Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel		
Dependen		
1. Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah adalah memenuhi prasyarat normatif agar mencapai tujuannya.	Instrumen 9 butir pernyataan mengacu pada penelitian Sukmaningrum (2012) dengan 4 indikator : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.

D. Alat Analisis

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada intinya merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut (Ghozali, 2013:19), statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewnes* kemencengan distribusi.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *unidimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan, maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2013: 55).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Spheriicity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Bartlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2013: 57).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2013: 47).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

$$KLK = \beta_1 PABA + \beta_2 SPI + \beta_3 MK + \beta_4 KSDM + e$$

Keterangan :

KLK	=	kualitas laporan keuangan
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$	=	koefisien regresi
PABA	=	penerapan akuntansi berbasis akrual
SPI	=	sistem pengendalian intern
MK	=	motivasi kerja
KSDM	=	kompetensi sumber daya manusia
e	=	error / residual

4. Pengujian Hipotesis

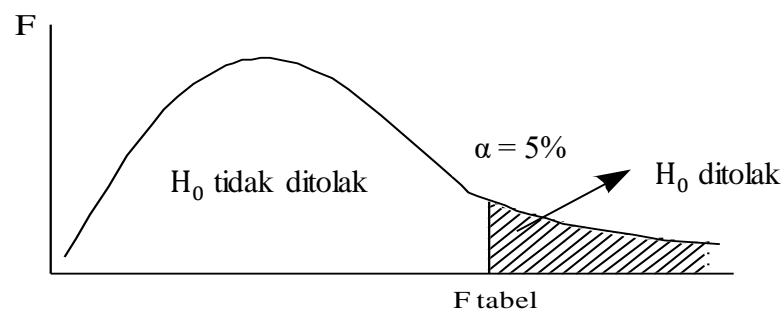
a. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013: 97). Uji R² menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (PABA), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Motivasi Kerja (MK), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2013:97)

b. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2013: 97). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df) = n - k - 1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam peneitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam peneitian tidak bagus (*tidak fit*).

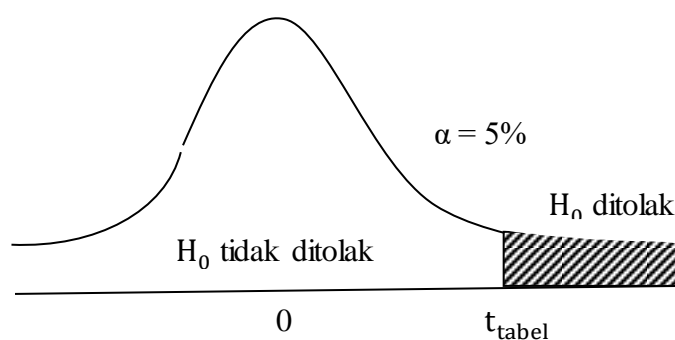


Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikasnsi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2013: 98).

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan motivasi kerja, serta kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 89 pegawai yang melaksanakan tata usaha akuntansi atau keuangan pada OPD yang terdiri dari Kasubag Keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi/ keuangan/pembukuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut; (1) Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal, Motivasi Kerja, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menjelaskan variabel Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebesar 58,8%, sedangkan sisanya 41,2% dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model pada penelitian ini, (2) Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yang artinya model yang digunakan sudah bagus, (3) Hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual, motivasi kerja, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Dinas dan Badan di OPD Kabupaten Magelang, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh OPD Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal, motivasi kerja, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh OPD Kabupaten Magelang serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya pengawasan keuangan, kepemimpinan, dan penerapan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2008). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anoraga, P., & Widiyanti, N. (1993). *Psikologi Dalam Perusahaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Armel, R. Y. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, 4.
- Badan Pemeriksa Keuangan 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. Melalui <http://www.bpk.go.id> diunduh tanggal 22 Desember 2017
- Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2.
- Febriyani, M., Kalangi, L., & Warongan, D. . (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal EMBA*, 5.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, D. R. (2015). Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara.

Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*. Retrieved from <http://www.osc.state.ny.us/>

<http://www.bpk.go.id> diakses 22 Desember 2017

<http://www.radarsemarang.com> diakses 15 Desember 2017

<http://www.republika.co.id> diakses 27 April 2018

<http://www.borobudurnews.com> diakses 29 Mei 2018

<http://www.semarang.bpk.go.id> diakses 29 Mei 2018

Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh kapasitas sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *SNA XI. Pontianak 23-25 Juli 2008*.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics*, 3.

Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21.

Lasmara, F., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3.

Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ejournal Unsrat*, 5, 98–109.

Lodhrakentjana, B., & Luthan, E. (2012). Motivasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Pegawai Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Depok. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, JRAP*, 1 No 2, 187–199.

Maharani, E. (2018). IAI Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Rendah. *Republika.co.id*.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Naryanti, I. (2013). Analisis Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Melalui Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja karyawan Pada CV.Kharisma Jaya Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Revisi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, VI.
- Rahayu, L., Kennedy, & Anisman, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *JOM FEKON*, 1.
- Robbins, S., & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2009). *Accounting Information Systems*. USA: Cengage Learning.
- Runtuwene, C., Saerang, D. P. ., & Morasa, J. (2017). Pengaruh Penerapan SIMDA, SAP, Motivasi Pegawai dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Ejournal Unsrat*.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach*,. New York-USA: John Wiley and Sons, Inc.
- Semarang, R. Kota-Kabupaten Magelang Meraih Predikat WTP, Radarsemarang.com (2017).
- Setiawan, I. W. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 671–700.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, 20.

- Siagian, S. P. (2001). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Haji Masagung.
- Stanbury, W. T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. *Fraser Institute Digital Publication*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Van der Hoek, M. . (2005). *Accrual-Based Budgeting and Accounting in the Public Sector: The Dutch Experience*. *MPRA Paper, Nomor 5906, Erasmus University Rotterdam*.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL BISNIS & EKONOMI*, 14, 57.

